

DETAIL RUANG LINGKUP
INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
IN007

Sifat	:	Spesialis
Klasifikasi	:	Instalasi
Kode Subklasifikasi	:	IN007
Kode KBLI	:	43221 (Instalasi Saluran Air (Plumbing))
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor, dan instalasi pompa.

BUJKN / BUJK PMA

1. Struktur Permodalan :

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

3. Kriteria teknis penanam modal asing :

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak

Tenaga Kerja Konstruksi :

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2. 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)
 - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau;
 - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Plumbing dan Pompa Mekanik atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Perpipaan
3. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh)
 - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau;
 - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Plumbing dan Pompa Mekanik atau;
 - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Perpipaan

Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 5.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 2 (dua) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, pipe jacking machine, Long Arm Excavator/Excavator, mobile crane, vibro hammer, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, dan butt fusion welding machine.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>chainsaw machine, hisel pneumatic, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, ponton material supply, video camcorder (handycam)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



ASKO
PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKO)

DETAIL RUANG LINGKUP
 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
 IN007

BUJKA		
Tenaga Kerja Konstruksi :		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau; - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Plumbing dan Pompa Mekanik atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Perpipaan 	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau; - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Plumbing dan Pompa Mekanik atau; - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Perpipaan 	
Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 10.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal	
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi	
Peralatan Konstruksi :		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : https://simpk.pu.go.id/	
<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 5 (lima) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, pipe jacking machine, Long Arm Excavator/Excavator, mobile crane, vibro hammer, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, dan butt fusion welding machine.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>chainsaw machine, hisel pneumatic, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, ponton material supply, video camcorder (handycam)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	